



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, MENANDATANGANI SURAT-SURAT
LAINNYA DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memperlancar administrasi kepegawaian serta kegiatan lainnya di bidang kepegawaian Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Izin Cuti Keluar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, MENANDATANGANI SURAT-SURAT LAINNYA DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang dan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan 4 untuk menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam lajur 2 bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Peraturan Bupati ini.

R

Pasal 2

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama sendiri.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (3) Apabila pejabat yang menerima delegasi berhalangan tetap atau sementara, penandatanganan surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Penandatanganan surat keputusan dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas dasar pemberian kuasa dari pejabat penerima delegasi wewenang yang berhalangan sementara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberi kuasa.
- (2) Pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menguasai lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (3) Apabila pejabat yang menerima kuasa berhalangan tetap atau sementara, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung dari pejabat yang diberi kuasa.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberikan kuasa.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

Paraf Hierarki	Kasubid	Kabid	Sekretaris BKD	Ka BKD	SEKDA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, MENANDATANGANI SURAT-SURAT LAINNYA DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN,
 SURAT-SURAT LAINNYA, DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO KEPUTUSAN / SURAT / KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI CPNS / PNS GOL.RUANG/ESELON/ JENJANG/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1 a. Formulir Usul Penetapan NIP		-Kepala BKD	-Semua golongan	
b. Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS		-Sekretaris Daerah -Kepala BKD	-Golongan III -Golongan I dan II	
c. Surat Tugas CPNS		-Kepala BKD	-Semua golongan	
d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS		-Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja	-Semua golongan	- Di lingkungan Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing
2 Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS		-Sekretaris Daerah -Kepala BKD	-Golongan III -Golongan I dan II	-Kecuali bagi CPNS yang Tewas, Meninggal atau Cacat karena Dinas
3 Berita Acara Sumpah/Janji PNS		-Sekretaris Daerah -Kepala BKD	-Golongan IV -Golongan 1 s.d III	
4 Surat Keterangan Uraian Tugas untuk : a. Ijin Belajar b. Keterangan Belajar				

1	2	3	4	5	6
c. Tugas Belajar d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah e. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah		- Kepala BKD		- Semua golongan	- Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang setingkat dengan Administrator (Eselon III) - Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
5 Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS		- Kepala Perangkat Daerah / setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	- Kepala BKD - Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja pada BKD - Kasubbid Penilaian Kinerja dan Kepangkatan pada BKD	- Gol. Ruang III/c ke III/d - Gol. Ruang III/a ke III/b s.d. III/b ke III/c - Gol. Ruang I/a ke I/b s.d. II/c ke II/d	- Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian
6 Petikan Keputusan Pengangkatan / Pemindahan / Pemberhentian dalam / dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi			- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) - Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV), Pelaksana	
7 Petikan Keputusan Pengangkatan / Pemindahan / Pemberhentian dalam / dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah / Kepala Puskesmas			- Kepala BKD	- Kepala Sekolah TK, SD, SMP - Kepala Puskesmas	
8 Petikan Keputusan Perpanjangan / Penugasan Kembali dalam Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah			- Kepala BKD	- Kepala Sekolah TK, SD, SMP	
9 a. Berita Acara Pelantikan dan Sumpah Jabatan			- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya - Administrator (Eselon III), - Pengawas (Eselon IV) - Kepala Sekolah TK, SD, SMP	

1	2	3	4	5	6
	b. Surat Pernyataan Pelantikan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda kebawah - Jabatan Fungsional Ketrampilan (semua Jenjang) - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya - Administrator (Eselon III) - Pengawas (Eselon IV) - Kepala Sekolah TK, SD, SMP - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda kebawah - Jabatan Fungsional Ketrampilan (semua Jenjang)	
	c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya - Administrator (Eselon III) - Pengawas (Eselon IV) - Kepala Sekolah TK, SD, SMP - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda kebawah - Jabatan Fungsional Ketrampilan (semua Jenjang)	
	d. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja pada BKD	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) - Administrator (Eselon III), - Pengawas (Eselon IV)	
	e. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Fungsional		- Kepala BKD	- Jenjang Ahli Utama, Ahli Madya	

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja pada BKD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenjang Ahli Muda, Ahli Pertama, semua jenjang Terampil 	
10	Keputusan Kenaikan Jabatan/Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional a. Kenaikan Jabatan b. Pembebasan Sementara		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah - Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang III/d ke IV/a) ke bawah /Penyelidikan ke bawah - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelidikan (Gol. Ruang III/d) ke bawah 	
11	Petikan Keputusan Penyesuaian/Pengangkatan Pertama/Perpindahan Jabatan/Kenaikan Jabatan/Pembebasan Sementara/Pengangkatan Kembali/Pemberhentian dalam/dari Jabatan Fungsional a. Penyesuaian Jabatan b. Pengangkatan Pertama/Perpindahan/Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional c. Kenaikan Jabatan		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja pada BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja pada BKD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/c) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/a dan IV/b) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelidikan (Gol. Ruang III/d) ke bawah - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/c) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/b) ke bawah/ Penyelidikan (Gol. Ruang III/d) ke bawah 	

1	2	3	4	5	6
			- Kepala BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Madya (Gol. Ruang III/d ke IV/a)/Penyelia, ke bawah	
	d. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari Jabatan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/a s.d. IV/c) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelia (Gol. Ruang III/d) ke bawah	
12	Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji - Berkala (SPTKG)		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja pada BKD - Kasubbid Penilaian Kinerja dan Kepangkatan pada BKD	- Gol. Ruang IV/c keatas - Gol. Ruang IV/a dan IV/b - Golongan III - Golongan I dan II	
13	Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran Gaji		- Kepala BKD	- Semua golongan	
14	Surat Rekomendasi		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan	
	a. Pemindahan antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan	
	b. Pemindahan antar Kabupaten/Kota ke Propinsi atau sebaliknya		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan	
	c. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah (tolos butuh)		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan	
	d. Surat Pernyataan Bebas Kasus		- Kepala BKD	- Semua golongan	

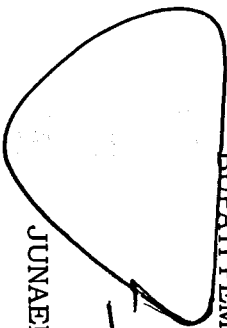
1	2	3	4	5	6
15	Keputusan Pemindahan Jabatan Fungsional dan Pelaksana a. Pemindahan antar Perangkat Daerah b. Pemindahan antar Unit Kerja/UPT dalam Lingkungan Perangkat Daerah c. Pemindahan PNS yang diangkat menjadi Sekretaris Desa atau sebaliknya		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kepala BKD - Kepala BKD	- Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya (Gol. Ruang IV/a s.d. IV/c) - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda/Penyelia (Gol. Ruang III/d) ke bawah - Semua jenjang/golongan - Semua golongan	
16	Surat Perintah Penugasan Diklat a. Diklat Kepemimpinan b. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kepala BKD	- Diklatpim II - Diklatpim III dan IV - Semua golongan	- Termasuk Tenaga Kependidikan Golongan IV
17	Surat Izin Belajar		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- S2 - S1 kebawah	
18	Surat Keterangan Belajar		- Kepala BKD	- Semua jenjang/strata	
19	Surat Keterangan Perolehan Ijazah a. Sebelum diangkat CPNS b. Sesudah diangkat CPNS sebelum diangkat PNS c. Surat rekomendasi Seleksi Administrasi dan Akademisi Tugas Belajar		- Kepala BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Semua jenjang/strata - S2 dan S3 - S1 kebawah - S2 dan S3 - S1 kebawah	

1	2	3	4	5	6
20	Surat Izin Penggunaan Gelar Kesartjanaan, Akademi/Diploma		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- PPDS I dan II, S3 - S2 kebawah	
21	a. Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian b. Surat Keterangan Melakukan Perceraian		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid. Mutasi dan Pembinaan pada BKD - Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kabid. Mutasi dan Pembinaan pada BKD	- Gol. Ruang IV/a, IV/b - Gol. Ruang II, III - Golongan I - Gol. Ruang IV/a, IV/b - Golongan II, III - Golongan I	
22	Surat Izin Cuti (Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting)	- Kepala BKD - Asisten Administrasi Sekda		- Semua golongan - Semua golongan	- Di Lingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah - Dikecualikan Cuti Besar, Cuti diluar tanggungan Negara, dan Cuti yang dilaksanakan ke luar negeri - Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah - Dikecualikan Cuti Besar, Cuti diluar tanggungan Negara, dan Cuti yang dilaksanakan ke luar negeri
23	Surat Izin Usaha Dagang		- Sekretaris Daerah	- Golongan I, II, dan III	
24	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan a. Dokter Penguji Tersendiri b. Tim Penguji Kesehatan		- Kepala Perangkat Daerah - Kepala BKD	- Semua golongan - Semua golongan	- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing

1	2	3	4	5	6
36	Tanda terima Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris BKD - Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan - Kepala Sub Bidang Status dan Penghargaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan Ruang IV/b s.d. IV/e - Golongan Ruang III/d s.d. IV/a - Golongan Ruang I/a s.d. III/c 	
37	Pengesahan/Legalisir atas fotocopy : a. Surat Keputusan <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan CPNS - Pengangkatan CPNS menjadi PNS - Kenaikan Pangkat - Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama dan Administrasi - Penyesuaian/Pengangkatan/Pemindahan/Kenaikan/Pembebasan Sementara/Pengangkatan kembali/Pemberhentian Jabatan Fungsional - Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian/Perparianangan/Pengawasan Kembali dlm Tugas Tambahan Kepala Sekolah b. Surat Ijin Belajar c. Surat Ijin Penggunaan Gelar Kesarjanaan, Akademi/Diploma		<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua golongan - Semua jenjang (eselon) - Jabatan Fungsional Ahli/Keterampilan Semua jenjang - Semua golongan - Semua jenjang/strata - Semua jenjang/strata 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan - Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan - Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan - Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan - Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan

1	2	3	4	5	6
25	Surat Izin Bebas Tugas		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan IV - Golongan I s.d III	- Kecuali PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas
26	Surat Pernyataan tidak pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir	- Kepala BKD		- Semua golongan	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan
27	Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tewas atau cacat	- Kepala Perangkat Daerah		- Semua golongan	- Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
28	Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta	- Kepala Perangkat Daerah		- Semua golongan	- Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
29	Keputusan Pemberian Uang Tunggu		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol. Ruang IV/a, IV/b - Golongan I, II, dan III	
30	Keputusan Pemberian Tunjangan Perawatan, Pengobatan, dan Rehabilitasi		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol. Ruang IV/a, IV/b - Golongan I, II, dan III	
31	Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol. Ruang IV/a, IV/b - Golongan I, II, dan III	
32	Keputusan Pemberian Uang Duka Tewas dan Biaya Pemakaman		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol. Ruang IV/a, IV/b - Golongan I, II, dan III	
33	Keputusan Pemberian Uang Duka Wafat		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol. Ruang IV/a, IV/b - Golongan I, II, dan III	
34	Surat Ketetapan Kecelakaan kerja untuk Perawatan	- Kabid. Mutasi dan Pembinaan pada BKD		- Semua golongan	- Bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja
35	Ijin Pencalonan Kepala Desa/Perangkat Desa		- Kepala BKD	- Semua golongan	

1	2	3	4	5	6
	d. Dokumen/Surat-surat Kepegawaian lainnya,		- Sekretaris BKD	- Semua jenis	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan


BUPATI PEMALANG
JUNAEDI

Paraf Hierarchy	Kasubid	Kabid	Sekretaris BKD	Ka BKD	SEKDA
	